

Teman-teman Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) yang kami hormati, merupakan kehormatan bagi saya untuk mengantarkan Bird's Head Seascape News yang ketiga ini. Semoga semua informasi yang ada di dalam media ini berguna untuk kita bersama.

Pada edisi keempat ini Anda bisa membaca kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mitra konservasi di BLKB diantaranya adalah Pembentukan Yayasan Kemitraan Jantung Konservasi Dunia, pembentukan Pokja Provinsi Konservasi, Deklarasi Adat Sistim Zonasi di Tugarni Group Teluk Arguni, cerita kapal pendidikan Gurano Bintang, serta cerita-cerita menarik lainnya.

Praktik-praktik yang baik harus terus disebarkan, salah satunya adalah melalui penerbitan newsletter ini, karena hakikatnya upaya menjaga kelestarian alam adalah tanggung jawab seluruh individu di muka bumi tanpa kecuali.

Terima kasih untuk semua yang telah memberikan masukan, informasi, foto dan sebagainya sampai terbitnya edisi ketiga newsletter BLKB ini. Semoga terus berkelanjutan semua karya kita untuk masyarakat luas.

Selamat membaca,

Henny Widayanti Manajer Sekretariat Bersama BLKB

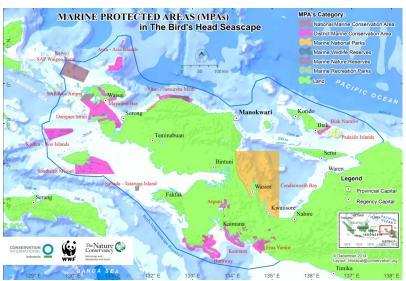


Sekilas Inisiatif BLKB

Inisiatif Bird's Head Seascape atau dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) dimulai pada tahun 2005 untuk mencari keseimbangan antara melindungi sumberdaya alam yang kaya dan memastikan rakyat tetap mendapatkan manfaat dari sumberdaya yang ada. Sebuah kemitraan yang kuat, yang didukung dana terbesar dari Walton Family Foundation untuk mencapai sukses dan belum pernah terjadi sebelumnya antara tiga LSM internasional yaitu Conservation International (CI), The Nature Conservancy (TNC), dan WWF (World Wildlife Fund) Indonesia dengan pemerintah lokal, provinsi dan nasional, masyarakat pesisir, universitas, dan organisasi lokal menyediakan sebuah landasan dimana pembangunan berkelanjutan dapat dicapai.

Pusat dari inisiatif yang ambisius ini adalah pembentukan dan implementasi dari jejaring multi pemanfaatan yang secara ekologis terhubung dan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang tangguh, didukung dan terintegrasi dalam peraturan lokal dan nasional, serta dikelola bersama oleh instansi pemerintah dan masyarakat lokal. KKP yang dideklarasikan secara lokal ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengelola KKP-nya sendiri, dan memperkuat hak ulayat darat dan laut. Pengelolaan dan rencana zonasi memasukkan teori pengelolaan perikanan yang maju sekaligus juga menghidupkan kembali sistem pengelolaan sumber daya alam tradisional Papua, seperti tradisi 'sasi' dan mendorong mereka untuk menjaga kebudayaan lokalnya.

Upaya-upaya tim BLKB dan mitra kami diarahkan menuju penguatan implementasi secara langsung di Bentang Laut dan mendukung kebijakan lintas sektoral, tata pemerintahan, pendidikan, pemantauan, dan inisiatif pembiayaan untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan dari BLKB.***



Upaya-upaya tim BLKB dan mitra kami diarahkan menuju penguatan implementasi secara langsung di Bentang Laut dan mendukung kebijakan lintas sektoral, tata pemerintahan, pendidikan, pemantauan, dan inisiatif pembiayaan untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan dari BLKB.

PENDANAAN KONSERVASI BERKELANJUTAN BLKB

Pembentukan Yayasan Kemitraan Jantung Konservasi Dunia

Pertemuan Tim Penasehat Persiapan Pendanaan Berkelanjutan BLKB yang dilaksankan pada tanggal 26 Juni 2015 di Hotel IBIS Tamarin telah menghasilkan beberapa hal konkrit kearah pembentukan yayasan, dengan nama "Yayasan Kemitraan Jantung Konservasi Dunia", berkedudukan di Manokwari dan dengan menggunakan Notaris di Manokwari. Kemudian pendirian Yayasan diproses dan siap ditandatangani oleh para pendiiri yang terdiri dari: 1) Bapak Freddy Numberi, 2) Bapak Marcus Wanma, 3) Bapak Phil Erari, 4) Ibu Johana Kamesrar, 5) Ibu Marice Kaikatuy.

Kemudian sebagai lanjutan dari pertemuan pendanaan berkelanjutan BLKB di bulan Maret, pada tanggal 26 Juni 2015, Sekretariat Bersama BLKB dan Tim Penasehat Persiapan Pendanaan Berkelanjutan BLKB menggelar pertemuan lanjutan Tim Penasehat Persiapan Pendanaan Berkelanjutan BLKB yang dilaksanakan di Swiss-Bel Hotel Manokwari, pada tanggal 9 September 2015. Tujuan pertemuan adalah untuk: 1) Penandatanganan akta notaris pendirian YKJKD, 2) Memahami dan menyepakati hubungan kerja Yayasan, KEHATI dan Blue Abadi, 3) Memahami badan pelaksana dan menyepakati calon nama-nama yang duduk dalam badan pelaksana.

Wilayah perairan laut Papua Barat yang juga dikenal dengan Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) adalah pusat keanekaragaman hayati laut, yang terletak di jantung segitiga karang. BLKB memiliki keragaman karang tertinggi di dunia, dengan lebih dari 1720 spesies ikan karang dan 600 karang scleractinia (sekitar 75% dari total yang ada dunia). Di BLKB juga terdapat habitat penting spesies laut yang terancam punah, termasuk penyu dan cetacea. Potensi daratan di Papua Barat juga tidak kalah menarik. Hutan yang masih alami menjadi tempat tinggal 657 burung, 191 jenis mamalia darat, 130 jenis katak, dan 151 jenis ikan air tawar.

Sebagai wilayah yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, Papua Barat tentunya tidak menginginkan kerusakan ling-kungan yang terjadi diwilayah lain di Indonesia terjadi di tanah ini. Praktik pengelolaan sumber daya alam harus benar-benar dilakukan secara bijak, hati-hati, tidak eksploitatif dan harus dapat memberikan keadilan sosial dan lingkungan secara terus menerus. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan lestari. Pencanangan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi ini akan menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan pembangunan secara bijaksana dan berkelanjutan di Papua Barat.*** (Teks: Henny Widayanti dan Nugroho Arif Prabowo)



Pembentukan Pokja Konservasi untuk Mempercepat Terwujudnya Provinsi Konservasi

nisiatif Gubernur Papua Barat dalam rangka mewujudkan Papua Barat sebagai wilayah yang tetap hijau dan cantik, lingkungan hidup terus terjaga secara bertahap mulai terwujud. Dalam kaitannya dengan maksud tersebut, telah dibentuk kelompok kerja berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat No.522.5/123/6/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Provinsi Konservasi Papua Barat.

Merujuk SK tersebut, Kelompok Kerja [POKJA] diberikan tugas sebagai berikut : 1) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi inisiatif penetapan Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi Konservasi; 2) Menyusun perencanaan dan mengadakan sosialisasi kepada semua *stakeholder* di Papua Barat mengenai rencana penetapan Papua Barat menjadi Provinsi KonservasiMempersiapkan dan membuat rumusan Draf RANPERDA Provinsi Konservasi; 3) Menyusun CETAK BIRU Provinsi Konservasi Papua Barat; 4) Melakukan koordinasi tentang aturan-aturan mengenai konservasi di tingkat daerah, nasional dan internasional; 5) Bekerjasama dengan instansi terkait untuk memberikan analisis pemanfaatan ruang sebagai bahan masukan kepada Gubernur Papua Barat untuk program pembangunan berwawasan lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah [RTRW] Provinsi Papua Barat, 6) Bekerjasama dengan instansi terkait untuk memastikan agar kawasan-kawasan konservasi di Papua Barat dikelola dengan prinsip perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;

7) Bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Papua Barat.

Pada tanggal 30 September, Pokja Provinsi Konservasi telah melakukan pertemuan pertama dan dari pertemuan tersebut telah menghasilkan draft rancangan Perdasus versi 0.1*** (Henny Widayanti/Conservation International)



Pembahasan dan Finalisasi SOP BLUD UPTD KKP Raja Ampat

Sejak tanggal 28 maret 2015 melalui SK Bupati Raja Ampat No. 61 tahun 2014, UPTD KKP Raja Ampat mendapatkan status sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status sebagai BLUD Bertahap. Dengan demikian, UPTD KKP Raja Ampat memiliki kewenangan untuk menerima dan mengelola pegawai secara mandiri, pengadaan barang dan jasa, keuangan dan kegiatan di lapangan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat (UPTD KKP Raja Ampat) adalah unit pelaksana yang berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Raja Ampat dengan tujuan untuk melaksanakan sebagain tugas DKP dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang berada di bawah kewenangan pengelolaan pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Penguatan kelembagaan dan penguatan pengembangan kapasitas adalah bagian terpenting dari proses penyiapan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan. Salah satu hal penting yang saat ini sedang menjadi fokus penguatan yaitu penguatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola lembaga atau organisasi BLUD UPTD KKPD.

UPTD sebagai lembaga baru dengan sistem yang baru, tentunya memerlukan standar-standar operasional prosedur pengelolaan baik yang bersifat teknis maupun operasional keorganisasian. Draft SOP-SOP untuk pengelolaan UPTD KKPD sudah disiapkan oleh tim transisi dari lembaga mitra, namun untuk bisa digunakan dan dilaksanakan secara legal maka sangat penting untuk mereview dan memfinalisasi semua draft SOP tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 11-13 Agustus 2015, bertempat di Hotel City View, Kota Sorong, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat, BLUD UPTD KKP Raja Ampat bersama para mitra yaitu Cl, TNC, dan Starling Resources menggelar kegiatan pembahasan atas draft SOP yang telah dibuat.

Melalui kegiatan ini diharapkan akan didapat pemahaman yang sama tentang SOP-SOP yang sudah disusun, selain itu dapat memberikan masukan-masukan dan perbaikan terhadap draft SOP yang telah dihasilkan untuk mempercepat proses legalisasi dan penerapan SOP-SOP di BLUD UPTD KKP Raia Ampat ***

(Teks dan foto: Nugroho Arif Prabowo/TNC)



DKP PB dan TNC Gelar Lokakarya Implementasi UU No. 23 / 2014

ejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan pembagian kewenangan di dalam pengelolaan sumber daya, yang semula sebagian besar dapat dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tingkat kabupaten, sekarang dialihkan ke DKP tingkat provinsi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut UU No 23/2014, terbit pada tanggal 2 Oktober 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan dan pengurusan sumber daya alam.

Implikasi dari undang-undang ini membuat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) penting untuk memahami, mengambil sikap dan peran dalam melaksanakan undang-undang ini di masa depan. Untuk membangun pemahaman bersama terhadap undang-undang ini lebih lanjut dan bagaimana implikasi pada urusan, organisasi, keuangan dan program di daerah pada waktu yang akan datang, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat bersama The Nature Conservancy (TNC) menggelar Lokakarya Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 Pada Sektor Kelautan dan Perikanan bagi Pemangku Kepentingan Terkait se-Provinsi Papua Barat di Swiss-Bel Hotel Manokwari tanggal 21-22 September 2015.

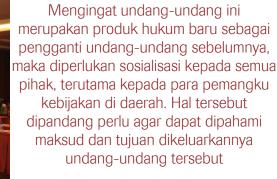
"Mengingat undang-undang ini merupakan produk hukum baru sebagai pengganti undang-undang sebelumnya, maka diperlukan sosialisasi kepada semua pihak, terutama kepada para pemangku kebijakan di daerah. Hal tersebut dipandang perlu agar dapat dipahami maksud dan tujuan dikeluarkannya undang-undang tersebut," kata Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Provinsi Papua Barat Nataniel D. Mandacan.

Lokakarya ini diikuti oleh para pemangku kepentingan terkait dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, LSM, Majelis Rakyat Papua Barat, Perguruan Tinggi serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada akhir lokakarya tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi usulan, salah satunya adalah pembentukan Pokja di tingkat Provinsi dan Pokja lintas sektoral di tingkat kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2014.***

(Teks dan foto: Nugroho Arif Prabowo/TNC)

77





Deklarasi Adat Sistem Zonasi di Tugarni Group Teluk Arguni

ejak dimekarkan dari Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana secara definitif memiliki kemandirian untuk mengelola potensi sumber dayanya untuk kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaimana. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor andalan yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan penunjang dan pendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

Tingginya keunikan, kekayaan dan potensi sumber daya laut Kabupaten Kaimana dalam .menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan suatu upaya untuk mengelola sumber daya ini secara berkelanjutan dan bersama oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat adat, juga sektor swasta. Pemerintah daerah telah menetapkan sebagian kawasan wilayah laut sebagai kawasan konservasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD). Dengan diterbitkannya PERDA ini, maka Strategi Pengembangan Pengelolaan KKPD Kaimana diletakan pada pengelolaan berbasis ekosistem dan adat. Untuk Pengelolaan KKPD berbasis masyarakat adat secara kontinyu dan berkelanjutan diperlukan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat adat.

Salah satu cara untuk memperoleh komitmen dari masyarakat adat tersebut adalah melalui Acara Deklarasi Adat. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaimana bersama Conservation International pada tanggal 17 September 2015 menggelar Deklarasi Adat Sistem Zonasi Tugarni Group Teluk Arguni. Tujuan diadakannya deklarasi adat ini adalah meletakkan dasar komitmen masyarakat adat khususnya 5 (lima) kampung yang berada di Tugarni Grup, Distrik Teluk Arguni untuk pengelolaan ekosistem laut dan pesisir secara terpadu, arif, bijaksana dan berkelanjutan. Peserta yang hadir dalam Deklarasi Adat sistem zonasi di Tugarni Group berasal dari 5 Kampung yang ada di Tugarni Group dan juga dari kampung-kampung tetangga seperti dari Sawi Group serta para undangan dari pemangku kepentingan terkait.

Kaimana memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Conservation International tahun 2007, diketahui bahwa kabupaten ini memiliki ekosistem laut yang unik dengan spesies endemik, serta rumah bagi ikan kerapu, kakap dan sejumlah ikan yang memiliki nilai ekonomis penting bagi perikanan tangkap. Bahkan di Teluk Arguni terdapat ekosistem mangrove yang sangat potensial.

Diawali dengan proses pemasangan sinara di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh ketua-ketua adat dan petuanan dari 5 Kampung yang tergabung dalam wilayah Tugarni Group, Teluk Arguni acara kemudian dilanjutkan dengan penjemputan tamu undangan mengunakan adat setempat seperti pengalungan tas lokal (tomang) kepada kepala Distrik Teluk Arguni, sebagai perwakilan pemerintah daerah Kaimana, juga kepada pimpinan CI Kaimana, dan Ketua Dewan Adat Kabupaten Kaimana.

Proses deklarasi adat dapat terlaksana dengan baik atas kerjasama antara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat di 5 Kampung yang ada di Tugarni Group, Teluk Arguni. Beberapa hasil dari kegiatan deklarasi tersebut adalah:1) Penetapan daerah tabungan ikan oleh tokoh-tokoh adat yang ada di 5 kampung yaitu Kokoroba, Afu-afu, Gusimawa, Bayeda dan Moyana yang tergabung dalam Tugarni Group Teluk Arguni; 2) Peresmian pos pengawasan untuk digunakan oleh anggota POKMASWAS Tugarni Group dalam melaksanakan patroli pengawasan; 3) Penyerahan baju POKMASWAS bagi anggota yang akan melakukan kegiatan pengawasan, sebagai tanda dimulainyan kegiatan pengawasan bagi POKMASWAS Tugarni Group Teluk Arguni, 4) Penandatanganan berita acara / piagam deklarasi oleh tokoh/ketua adat di 5 Kampung di Tugarni group Teluk Arguni.****

(Irwan Pasambo/Conservation International)



Suasana Deklarasi Adat Sistem Zonasi di Tugarni Group Teluk Arguni. (*Foto: Conservation International*)

Merancang Jejaring Kawasan Konservasi Laut yang Tangguh di Raja Ampat

etika mendengar Raja Ampat, hampir semua orang membayangkan suatu kawasan wisata alam dengan pemandangan alam dan bawah laut yang menakjubkan. Kabupaten Raja Ampat yang terletak di ujung barat di Provinisi Papua Barat ini memang memiliki keindahan alam luar biasa dan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Bahkan kawasan yang terdiri dari 4 pulau besar dan ratusan pulau kecil ini sering disebut sebagai 'surga di tanah Papua' atau 'mutiara di Kepala Burung- Papua' atau 'amazon laut di dunia'. Survey penilaian ekologi cepat yang dilakukan oleh The Nature Conservancy (TNC) dan Conservation International (CI) mencatat 1,074 jenis ikan karang dan 488 jenis karang keras ada di perairan ini. Sementara itu Allen dan Erdmann (2009) menemukan sebanyak 1.320 jenis ikan karang yang sebagian diantaranya merupakan spesies unik dan endemik. Duyung, pari manta berbagai jenis ikan hiu termasuk hiu karpet (wobbegong sharks) dan hiu berjalan (Kalabia) yang unik dan menarik juga dapat dengan mudah dijumpai di perairan ini. Sebanyak 14 jenis paus dan lumba-lumba juga dapat dijumpai di sini. Gugusan pulau yang bervariasi baik pulau kecil berpasir putih maupun pulau kapur atau karst yang indah juga ada di Raja Ampat.

Sayangnya keanekaragaman hayati laut Raja Ampat terancam oleh aktifitas perikanan yang merusak seperti penggunaan bom dan bius serta penangkapan ikan yang berlebihan. Menurut masyarakat lokal, 10 tahun yang lalu hampir setiap hari dapat disaksikan nelayan yang berasal dari luar kawasan ini menggunakan bom. Tim patroli pengawasan masyarakat yang didukung oleh Pemda Raja Ampat, TNC dan Cl mencatat setidaknya terdapat 10 kali kasus nelayan pengebom ikan yang tertangkap dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sampai saat ini ketika kesadaran masyarakat lokal sudah tinggi, Penggunaan kompresor hookah untuk menangkap ikan, lobster atau biota lainnya yang dilarang oleh undang-undang pun juga masih sering ditemukan, walaupun frekuensinya sudah jauh berkurang dalam 3-4 tahun terakhir ini. Penangkapan biota laut yang dilindungi juga masih banyak ditemukan. Sebagian masyarakat pun masih belum menyadari ancaman kepunahan terhadap beberapa biota laut, sehingga penangkapan penyu, kima raksasa, ketam kelapa dan biota lainnya yang dilindungi undang-undang pun masih sering dijumpai.

Ancaman lain adalah adanya penangkapan ikan dan sumber daya laut secara berlebihan. Pelakunya sebagian besar adalah nelayan dari luar kawasan ini. Hasil monitoring pemanfaatan sumber daya laut di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kofiau dan Misool menemukan bahwa nelayan asal Sulawesi, Maluku, Seram, Halmahera, Flores yang mendominasi penangkapan ikan di Raja Ampat, bahkan nelayan-nelayan tersebut mengeruk lebih dari 90% hasil laut sedangkan nelayan lokal memanen tidak lebih dari 10%-nya saja. Tim pengawasan juga sering menemukan nelayan dari Philipina dan Vietnam.

.Pemerintah dan masyarakat Raja Ampat konsisten dan berusaha bersungguh-sungguh mengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah dengan baik dan profesional meskipun banyak kendala. Terutama karena terbatasnya jumlah dan minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam mengelola kawasan konservasi laut. Dengan dukungan yang kuat dari Dinas Kelautan dan Perikanan, BLUD UPTD KKP Raja Ampat, TNC, CI, pengusaha dan pelaku pariwisata, pengelolaan kawasan konservasi perairan di Raja Ampat dapat berjalan dengan baik. Kegiatan rutin yang menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat adalah kegiatan patroli lokal. Masyarakat menyadari keterbatasan pemerintah dan aparat kemanaan untuk menjaga kawasan konservasi seluas lebih dari 1 juta hektar ini, sehingga terlibat aktif berpatroli. Patroli masyarakat ini menjadi salah satu kunci keberhasilan menjaga sumber daya alam. Berbagai kegiatan pemantauan sumber daya alam secara rutin juga selalu dilakukan.**** (*Purwanto/The Nature Conservancy*)





Peduli Pendidikan Anak lewat KM. Gurano Bintang

WF-Indonesia sebagai lembaga konservasi tertua di Indonesia juga memberikan perhatian khusus pada pendidikan anak-anak. Salah satunya dengan mengupayakan pendidikan konservasi di kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC), Papua. Berkeliling bersama sebuah kapal motor bernama KM. Gurano Bintang, tim fasilitator memberikan pendidikan lingkungan serta bantuan nutrisi bagi anak-anak di desa-desa di sekitar TNTC. Untuk mendukung kegiatan pendidikan serta menarik minat anak-anak, kapal ini dilengkapi dengan perpustakaan dan alat-alat multimedia. Nuansa ceria khas anak-anak dihadirkan melalui gambargambar hasil kreativitas pemenang lomba gambar anak-anak saat peresmian kapal pada 20 April 2007 silam.

KM. Gurano Bintang sebenarnya merupakan kapal konservasi yang melakukan pengawasan terhadap kawasan laut dan populasi Hiu Paus (Whale Shark). Maka tak heran bila para peneliti yang bertugas di atas kapal motor ini juga pernah ikut mengajar anak-anak seputar lingkungan hidup, terutama lingkungan laut dan cara-cara konservasinya. Salah satunya Casandra Tania, Marine Species Officer WWF-Indonesia yang pernah mengajar anak-anak. Dengan ilmu dan pengalamannya sebagai peneliti hiu paus, perempuan yang akrab dipanggil Cassie ini berbagi pengetahuan tentang hiu paus, biota yang dilindungi, serta kegiatan perikanan yang tidak merusak.

Melihat anak-anak yang bersemangat dan ceria ketika mengunjungi KM. Gurano Bintang membuatnya sangat senang. Salah satu pengalamannya yang paling berkesan adalah ketika anak-anak dari Kampung Syabes, Kabupaten Teluk Wondama, datang ke kapal dengan berenang sejauh 200-500 meter untuk bisa bermain dan belajar di KM. Gurano Bintang. Antusiasme mereka tersebut menunjukkan bahwa anak-anak memiliki minat positif terhadap kegiatan yang berlangsung di atas kapal yang dicat warna-warni tersebut. "Semoga mereka kelak dapat menjadi anak yang peduli terhadap laut dan dapat menjadi agen perubahan di kampungnya masing-masing," harap Cassie.

Senada dengan misi pendidikan KM. Gurano Bintang untuk membangun kepedulian masyarakat pada kelestarian kekayaan hayati yang mereka miliki serta membentuk generasi baru yang memiliki wawasan alam dan tergerak secara sukarela menjaganya, tim outreach KM. Gurano Bintang pun melakukan kunjungan ke desa-desa untuk menjangkau anakanak yang tinggal di desa-desa terpelosok di wilayah Ka-

bupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Waropen dan Yapen.

Tim dari KM. Gurano Bintang melakukan kunjungan ke kampung-kampung pesisir sekitar TNTC setiap empat bulan sekali terkadang dua bulan sekali tergantung kebutuhan program. Dalam setiap trip, tim outreach mengajak anak-anak di desa yang mereka kunjungi untuk belajar melalui permainan menarik. Permainan tersebut telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga berisi pesan-pesan mengenai lingkungan hidup, terutama pengetahuan mengenai kehidupan laut dan cara menjaga kelestariannya. Satu kelompok (sekitar 20 orang) akan dipandu oleh dua orang fasilitator pendidikan lingkungan. Tim fasilitator adalah gabungan antara staf dari kantor Dinas Pendidikan, Badan Lingkungan Hidup, Penyuluh dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Nabire dan Teluk Wondama, Penyuluh dari BBTNTC, serta staf WWF-Indonesia. Tim fasilitator akan dibagi dalam tiga kelompok, yakni tim pendidikan untuk anak usia sekolah, pendampingan guru, dan pendidikan untuk orang dewasa (ibu-ibu dan bapak-bapak nelayan).

Biasanya, kunjungan akan ditutup dengan pembagian nutrisi kepada anak-anak, seperti bubur susu kacang hijau serta pengobatan dan pemeriksaan kesehatan sederhana. Kehadiran KM. Gurano Bintang telah memberikan manfaat nyata bagi pendidikan dan perbaikan gizi anak-anak di pedalaman TNTC. Feronika Manohas, Community Outreach and Development Coordinator WWF-Indonesia di area TNTC menceritakan bahwa para orang tua sangat bersemangat menyiapkan anak-anaknya ke sekolah tatkala mengetahui bahwa tim dari Gurano Bintang akan mengunjungi mereka. "Semoga trip Gurano Bintang dapat mempengaruhi model pendidikan di kampung-kampung dan meningkatkan kesadaran orang tua untuk mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya," tutur Feronika.

Anda dapat membantu anak-anak di kawasan TNTC untuk mendapatkan hak pendidikan dengan memberikan donasi melalui *www.supporterwwf.org* demi keberlangsungan kegiatan penelitian dan pendidikan di KM. Gurano Bintang. Senyum ceria anak Indonesia yang sehat dan berpengetahuan luas merupakan tanda generasi penerus yang berkualitas. ***

(Natalia Trita Agnika /WWF-Indonesia)





Memanggil Dewa Laut untuk Konservasi

Dua tokoh adat Suku Abun, tampak berjalan menuju bibir pantai . Balutan busana yang dikenakan berhiaskan burung Cendrawasih. Mereka membawa tombak, parang, tas, tikar, juga daun kelapa. Mereka berniat memanggil penyu di lautan.

Usai ritual dilakukan, seorang tokoh adat perempuan terus berjalan menuju laut. Ia kemudian memukul permukaan laut sebanyak tiga kali. Memberikan isyarat kepada laut, yang selama ini menjaga penyu. Ia juga seperti memberikan abaaba agar penyu mau datang, dan bertelur di pantai sebelum akhirnya kembali lagi ke laut.

Upacara adat pemanggilan penyu atau ritual 'moke womom' memang kini kerap dilakukan warga adat Suku Abun. Pasalnya suku itu sekarang ini makin merasakan berkurangnya keberadaan penyu belimbing yang datang bertelur di Pantai Jamursba Medi dan Pantai Warmon Kabupaten Tambrauw, Papua Barat.

Johanis Sundoy, tokoh masyarakat di Jamursba Medi bilang kalau pelaksanaan upacara adat pemanggilan penyu dilakukan dengan berbagai persiapan. Mulai dari sidang adat tertutup, hingga acara ritual pemanggilan di laut. Sidang adat tertutup dilakukan untuk memastikan tempat dan mempersiapkan waktu pelaksanaan upacara adat.

"Dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara tertutup oleh 13 tokoh adat, sementara 2 tokoh adat lainnya melakukan ritual di pinggir pantai, untuk membuktikan ada kontak batin yang tercipta dan mereka meyakini akan terjadi saat upacara adat pemanggilan penyu dilaksanakan. Serta memberikan makna dalam menyatukan kembali peradaban mereka di masa lalu, dengan kehidupan masa kini dan perkembangan hari depan", kata Yohanis Sundoy, akhir Juni 2015.

Biasanya ritual adat dilakukan menjelang senja, mengingat waktu penyu datang untuk bertelur selalu di malam hari hingga menjelang pagi. Sementara bulan Juni hingga Juli merupakan musim puncak peneluran penyu di pantai peneluran Jamursba Medi.

Bagi masyarakat adat suku Abun, penyu belimbing dianggap dewa laut yang perlu dilindungi. Hingga sekarang masyarakat adat Suku Abun masih percaya bila ritual panggil penyu dilakukan, maka penyu akan datang.

"Di Warmamedi sendiri, setelah pelaksanaan ritual ada sembilan penyu yang naik ke darat untuk bertelur, nanti akan lebih banyak lagi, dan ritual ini bukanlah pertama kali dilaksanakan, ini sudah turun temurun tapi dulu lebih bersifat kekeluargaan atau sering dibuat secara keluarga", tambah Yohanis Sundoy.

Secara adat para tokoh adat Suku Abun memberikan nama bagi kawasan peneluran penyu belimbing dan penyu lainnya di Jamursba Medi dengan nama 'Jen Wowom'. Kawasan itu berada dari daerah Saubeba hingga Wao, sepanjang 24 kilometer. Sedangkan pantai peneluran mulai dari Warmamedi hingga Wao sejauh enam kilometer disebut "Jen Suap". Sementara pantai peneluran sejauh 18 kilometer mulai dari Saubeba hingga Warmamedi dikatakan "Jen Yesa".

Pemerintah daerah setempat sendiri tak berkeberatan bila masyarakat menyelanggarakan ritual memanggil penyu. Gustifar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw mengatakan pesta adat yang dilakukan masyarakat terkait penyu perlu didukung, karena penyu terutama penyu belimbing dapat menjadi ciri khas daerah serta promosi wisata.

Data dari WWF Indonesia kantor Tambrauw, jumlah sarang telur penyu Belimbing di pantai Jamursba Medi pada periode 2007 – 2011 berkisar antara 1385 – 2062. Jumlah tertinggi diperoleh pada tahun 2007, dengan 2062 sarang dan terendah pada tahun 2010, dengan 1.385 sarang. Secara umum, berdasarkan pengamatan jumlah sarang ini, populasi penyu belimbing di Pantai Jamursba Medi selama periode 5 tahun terakhir ini mengalami penurunan.

"Sebenarnya banyak faktor penyebab terjadinya penurunan, selain ancaman predasi seperti anjing, babi dan biawak. Pola migrasi mencari makan penyu dewasa jauh menyebabkan penyu dewasa rawan ditangkap", ungkap Ronald Tethool, Project Leader WWF Indonesia Kantor Tambrauw.

Hasil penelitian WWF juga menunjukkan bahwa kegagalan penetasan telur penyu bisa berhubungan dengan tingginya temperatur pasir, yang melebihi ambang toleransi hidup embrio. Pesisir Abun sendiri berada di dataran rendah bagian utara daerah Kepala Burung Papua dan merupakan lokasi habitat bertelur penyu laut di Indonesia khususnya penyu Belimbing. ***

(Sumber: Niken Proboretno/Ekuatorial.com)

Penghargaan Hj. Aliyah Rasyid Baswedan Award untuk Konservasi di Raja Ampat

Pabu 5 Agustus 2015, CI Indonesia khususnya program Raja Ampat mendapatkan penghargaan "Prof. Dr. Hj. Aliyah Baswedan Award 2015" dari Jaringan Intelektual Muda Papua Daerah Sorong. CI mendapatkan penghargaan ini atas dedikasi CI dengan sepenuh hati, optimis dan inspiratif untuk menjaga alam titipan generasi penerus di tanah Papua. Penghargaan diserahkan langsung oleh Prof.Dr. Hj. Aliyah Baswedan dan didamping oleh Anis Baswedan, Menteri Pendidikan Dasar, Republik Indonesia. CI sebagai lembaga konservasi yang telah bekerja di Raja Ampat sejak lebih dari 10 tahun lalu dinilai banyak memberikan kontribusi untuk membangun generasi muda di Raja Ampat yang peduli dengan alam. Dalam acara ini, CI diwakili oleh Alberth Nebore, Raja Ampat Senior Corridor Manager Conservation International.

Penghargaan Prof.Dr. Hj. Aliyah Baswedan tahun 2015 ini juga diberikan kepada 24 individu atau lembaga lain yang juga ber-kontribusi terhadap pengembangan pendidikan di Tanah Papua. Beberapa lembaga konservasi di Raja Ampat yang menerima penghargaan ini diantaranya Yayasan Kalabia Indonesia, The Nature Conservancy, RARE Indonesia dan Pasangan Bupati/Wakil Bupati Raja Ampat.

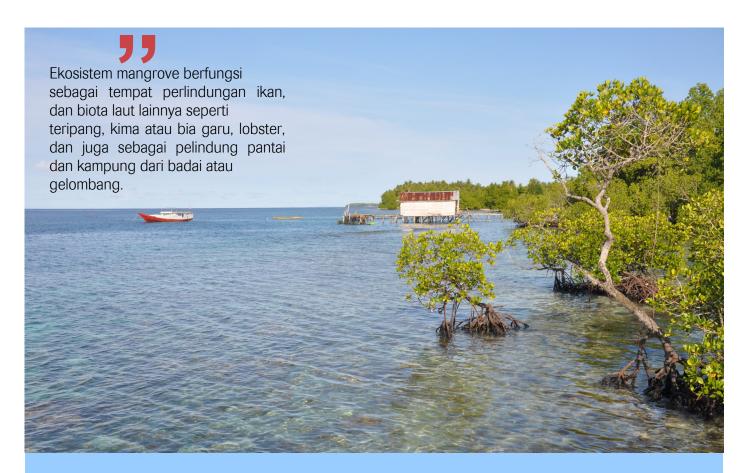
Selamat untuk CI, Yayasan Kalabia Indonesia, TNC, RARE Indonesia dan Pasangan Bupati/Wakil Bupati Raja Ampat atas penghargaan yang diterima!! *** (Wida Sulistyaningrum/Conservation International)



Raja Ampat Berpartisipasi dalam Coral Triangle Marine Tourism Expo



Pemkab Raja Ampat bersama mitra seperti CI dan TNC berpartisipasi dalam Coral Triangle Marine Tourism Expo dalam rangkaian Regional Business Forum ke-4 yang dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2015 di Nusa Dua Hall 3, Bali Nusa Dua Convention Center. Acara ini diikuti oleh lebih dari 20 peserta baik dari Pemda, LSM, serta operator dan pelaku bisnis yang terkait dengan Marine Ecotourism. *(Foto: Conservation International)*



Ekosistem Mangrove di Kepulauan Kofiau dan Boo

angrove, atau yang umum disebut dengan bakau atau mange-mange oleh masyarakat di Raja Ampat, merupakan salah satu jenis tumbuhan yang hidup dan tumbuh di daerah kering di pinggiran pantai. Jenis pohon atau ekosistem ini banyak terdapat di Kepulauan Kofiau dan Boo.

Ekosistem mangrove berfungsi sebagai tempat perlindungan ikan, dan biota laut lainnya seperti teripang, kima atau bia garu, lobster, dan juga sebagai pelindung pantai dan kampung dari badai atau gelombang. Mangrove juga biasanya digunakan oleh masyarakat lokal yang berada di Kepulauan Kofiau untuk membangun rumah, sebagai kayu bakar dan obat tradisional.

Selain berfungsi sebagai rumah bagi biota laut dan pelindung kampung dari hempasan ombak, dahulu mangrove juga dimanfaatkan oleh masyarakat Kofiau untuk pembangunan rumah.

Hal ini dilakukan oleh masyarakat karena pada tahun 1970-an belum ada peralatan yang dapat masyarakat gunakan untuk membelah kayu balok seperti gergaji mesin. Pada tahun 1990-an masyarakat Kofiau sudah jarang mengunakan mangrove sebagai bahan bangunan rumah dan hanya memanfaatkan mangrove kering untuk kayu bakar.

Orang tua pada masa dahulu belum mengerti ataupun tahu bahwa mangrove penting bagi kehidupan biota laut untuk bertelur dan berkembang biak yang nantinya akan memberi nilai ekonomis bagi kehidupan masyarakat.

Setelah adanya sosialisasi lingkungan hidup oleh The Nature Conservancy (TNC) pada tahun 2005 hingga sekarang ini, masyarakat pun memahami hal ini dan mulai mengurangi pengambilan pohon mangrove untuk pembangunan rumah dan jembatan.

Oleh sebab itu, sekarang masyarakat pun sudah ikut melindungi ekosistem mangrove yang ada di Kepulauan Kofiau dan Boo.

(Penulis: Naftali Manggara) (Foto: Nugroho Arif Prabowo/TNC)

Program INOVASI untuk Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Konservasi

ntuk mendukung pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, Conservation International (CI) selama kurun 10 tahun terakhir telah berkomitmen untuk mendukung kegiatan konservasi khususnya di wilayah Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) dengan fokus jangka panjang untuk membantu masyarakat lokal dalam pembangunan yang berkelanjutan serta membuat mereka mempunyai kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di wilayah Bentang Laut Kepala Burung.

Salah satu hasil dari pekerjaan ini terletak pada pengembangan jaringan kelompok masyarakat yang terlibat dalam upaya konservasi laut di wilayah perairan yang dilindungi, untuk menjamin kepemilikan lokal dari program konservasi laut di wilayah masing masing bagi pelaksanaan upaya konservasi laut. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah melalui program INOVASI – Program Hibah Konservasi Bentang Laut Kepala Burung. Program Dana Hibah INOVASI ini ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam upaya konservasi. Penyediaan dukungan atas pendanaan dan pengelolaan proyek bagi masyarakat sipil ini diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat Papua Barat secara lebih luas dalam konservasi lingkungan hidup di kawasan Bentang Laut Kepala Burung. Proyek yang diajukan harus berfokus pada usaha konservasi kawasan kelautan dan pesisir di Papua Barat, serta memiliki sasaran yang bertujuan pada upaya – upaya pemeliharaan lingkungan habitat dan keberadaan spesies laut di wilayah tersebut, penguatan tata kelola perikanan, peningkatan kapasitas konservasi, atau pendekatan inovatif guna pelibatan kemitraan baru dalam usaha konservasi.

Program yang didukung oleh MacArthur Foundation ini akan diberikan kepada beberapa penerima yang telah mengumpulkan proposal dan telah lolos seleksi untuk kegiatan yang berkaitan dengan program pendanaan kelautan. Periode pencairan hibah dan pelaksanaan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama akan dilaksanakan pada bulan Mei 2015-Juni 2017, sedangkan tahap kedua akan dilaksanakan pada bulan Maret 2016-Juni 2017...

Hingga batas akhir penutupan penerimaan proposal pada tanggal 30 Juni 2015, Cl menerima 34 proposal dari lembaga masyarakat lokal dari 3 Kabupaten di wilayah BLKB. Jumlah proposal yang diterima menandakan tingginya minat dari masyarakat untuk lebih terlibat dalam kegiatan konservasi. Untuk mencapai tujuan program tersebut, Cl dan mitra di jejaring BLKB, World Wildlife Fund (WWF), The Nature Conservancy (TNC) dan Universitas Negeri Papua (UNIPA) telah membentuk tim penyeleksi proposal. Setelah melalui proses seleksi, hasilnya adalah, panitia seleksi telah memutuskan 17 lembaga yang berhasil menerima hibah untuk tahap pertama, dengan total nilai hibah keseluruhan mencapai Rp 1.254.830.000. ****

(Teks: Dewi Nursanti dan Nugroho Arif Prabowo)



Newsletter ini diterbitkan oleh Sekretariat Bentang Laut Kepala Burung Jl. Transito no. 56, Wosi, Manokwari 98312, Papua Barat.

- Henny Widayanti , E-mail: hwidayanti@conservation.org
- Nugroho Arif Prabowo, E-mail: nprabowo@tnc.org
- Wida Sulistyaningrum, E-mail: wsulistyaningrum@conservation.org
- Feronika Manohas, E-mail: fmanohas@wwf.or.id

CONSERVATION INTERNATIONAL Indonesia





BENTANG LAUT KEPALA BURUNG, PAPUA